



Konseptualisasi Etika Politik Dalam Kurikulum Sekolah Mengintegrasikan Kesadaran Warga Negara Yang Berintegritas

Javira Salma Rimanda¹, Sri Minarti²

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

javirasalma97@gmail.com¹, minarti@unugiri.ac.id²

Article Info

Article history:

Received May 15, 2026

Revised May 27, 2026

Accepted June 10, 2026

Keywords:

Political Ethics, School Curriculum, Civic Awareness, Integrity, Civic Education

ABSTRACT

This study examines the conceptualization of political ethics in the school curriculum to build citizen integrity in Indonesia. Amid the challenges of corruption, this education is vital for shaping the character of the youth. Using a qualitative approach—through interviews with education practitioner Agus Hermawanto S.Pd. and literature reviews—the research highlights curriculum planning, pedagogical methods, implementation challenges, evaluation, and stakeholder roles. The main findings indicate that integrating political ethics requires a holistic approach that fundamentally transforms the civic education paradigm, rather than simply adding learning materials. This study also provides strategic recommendations for policymakers and educators.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 15, 2026

Revised May 27, 2026

Accepted June 10, 2026

Keywords:

Etika Politik, Kurikulum Sekolah, Kesadaran Warga Negara, Integritas, pendidikan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Studi ini mengkaji konseptualisasi etika politik dalam kurikulum sekolah untuk membentuk warga negara berintegritas di Indonesia. Di tengah tantangan korupsi, pendidikan ini penting untuk membangun karakter generasi muda. Melalui pendekatan kualitatif—berupa wawancara dengan praktisi pendidikan Agus Hermawanto S.Pd. dan studi literatur—penelitian ini menyoroti perencanaan kurikulum, metode pedagogis, tantangan implementasi, evaluasi, serta peran pemangku kepentingan. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi etika politik memerlukan pendekatan holistik yang mentransformasi paradigma pendidikan kewarganegaraan, bukan sekadar penambahan materi. Studi ini juga memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan pendidik.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Javira Salma Rimanda

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

E-mail: javirasalma97@gmail.com



Pendahuluan

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, pembentukan karakter warga negara yang berintegritas menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat lagi diperkirakan. (Karya et al., 2026) Pendidikan memiliki posisi strategis sebagai salah satu instrumen utama dalam membentuk kesadaran politik dan etika generasi muda. Namun, selama ini pembelajaran etika politik di sekolah cenderung bersifat teoritis dan terpisah dari konteks kehidupan masyarakat yang riil. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara apa yang diajarkan di kelas dengan apa yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang bertanggung jawab. (Pengantar, 2013)

Konseptualisasi etika politik dalam kurikulum sekolah memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif. Bukan sekedar mengajarkan teori-teori tentang pemerintahan atau sistem politik, tetapi masuk pada pembentukan kesadaran mendalam tentang bagaimana menjadi warga negara yang memiliki integritas, jujur, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dengan etika yang benar. Artikel ini mengkaji berbagai aspek terkait integrasi etika politik dalam kurikulum sekolah, mulai dari Perencanaan Kurikulum hingga peran seluruh pemangku kepentingan dalam implementasinya. (Jurnal et al., 2010.).

Perencanaan kurikulum yang mengintegrasikan etika politik memerlukan landasan filosofis yang kuat sebagai landasan konseptual. Bapak Agus Hermawanto S.Pd, seorang praktisi pendidikan dengan pengalaman bertahun-tahun di bidang pengembangan kurikulum, menyatakan bahwa “etika politik dalam kurikulum tidak boleh sekedar menjadi materi tambahan yang bersifat insidental, melainkan harus terintegrasi secara organis dalam seluruh dimensi kurikulum. (Pemerintahan et al., n.d.)” Pernyataan ini menunjukkan bahwa etika politik memerlukan pemikiran ulang mendasar tentang bagaimana kurikulum dirancang dan dikembangkan. (Ristanto, 2026).

Dari perspektif yuridis, perencanaan kurikulum etika politik memiliki landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang menghasilkan. Lebih lanjut, Kurikulum Merdeka yang kini diterapkan di Indonesia memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengintegrasikan pembelajaran yang bersifat penguatan karakter, termasuk etika politik dan kesadaran warga negara. (Orang et al., n.d.)

Dalam merancang kurikulum yang mengintegrasikan etika politik, terdapat beberapa prinsip fundamental yang harus diperhatikan. Pertama, prinsip relevansi kontekstual, yaitu kurikulum harus terkait langsung dengan konteks kehidupan masyarakat yang berhadapan



dengan peserta didik. (Kegiatan et al., 2000) Kedua, prinsip perkembangan kognitif dan moral, yaitu materi etika politik harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif dan moral peserta didik. Ketiga, prinsip integrasi lintas mata pelajaran, yaitu etika politik tidak boleh diterapkan dalam satu mata pelajaran saja, melainkan harus terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran. (Ilmu et al., 2020).

Bapak Agus Hermawanto S.Pd menekankan bahwa perencanaan kurikulum etika politik harus dimulai dengan analisis kebutuhan (needs assessment) yang mendalam. “Kita perlu mengkaji terlebih dahulu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dalam konteks kesadaran politik dan etika saat ini. Apakah mereka membutuhkan pemahaman tentang partisipasi politik yang aktif? Apakah mereka membutuhkan penguatan antisuap? Atau apakah mereka membutuhkan pemahaman tentang sistem checks and balances? Semua ini harus dikaji secara komprehensif terlebih dahulu,” jelas Bapak Agus Hermawanto.

Perencanaan kurikulum struktur etika politik dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. (Agung, 2003) Pertama, pendekatan integrasi horizontal, yaitu etika politik yang diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran yang sudah ada, seperti PPKn, Sejarah, Bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lainnya. Kedua, pendekatan Kontekstual, etika politik dikembangkan secara bertahap dari tingkat SD hingga SMA dengan materi yang semakin kompleks dan mendalam. Ketiga, pendekatan mata pelajaran mandiri, yaitu etika politik dikembangkan sebagai mata pelajaran khusus dengan waktu pelajaran tersendiri. (Pengembangan et al., n.d.)

Berdasarkan pengalaman Bapak Agus Hermawanto S.Pd dalam implementasinya di lapangan, pendekatan kombinasi integrasi horizontal dan vertikal cenderung memberikan hasil yang lebih optimal. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu mata pelajaran untuk membentuk kesadaran etika politik yang komprehensif. Kita perlu melibatkan seluruh matapelajaran secara terkoordinasi,” tandasnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kebijakan (policy study) yang bersifat eksploratoris-deskriptif (Mahardika et al., 2024). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada karakteristik yang mengkaji fenomena kompleks terkait integrasi etika politik dalam kurikulum, di mana fenomena tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui data kuantitatif semata, melainkan memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan proses yang terjadi (No et al., 2017).

Desain studi kebijakan dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah kebijakan publik dalam bidang pendidikan, khususnya kebijakan kurikulum yang mengintegrasikan etika politik. Studi kebijakan memungkinkan peneliti untuk mengkaji tidak hanya aspek teknis implementasi, tetapi juga aspek politis, sosial, dan kultural yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan (Aida & Aurora, 2024). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam



dengan praktisi pendidikan, sedangkan data sekunder dikaji dari berbagai literatur dan regulasi kebijakan pendidikan terkait.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, implementasi etika politik dalam kurikulum sekolah memerlukan perencanaan yang matang dan terstruktur agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pembentukan karakter peserta didik. Perencanaan kurikulum tidak hanya berfokus pada penyampaian teori mengenai politik, tetapi juga menanamkan nilai moral, integritas, tanggung jawab, serta kesadaran berbangsa dan bernegara kepada peserta didik. Hal tersebut penting karena pendidikan etika politik memiliki tujuan utama membentuk generasi yang memiliki karakter demokratis, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Bapak Agus Hermawanto S.Pd menjelaskan bahwa dalam penyusunan kurikulum etika politik terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Prinsip pertama adalah relevansi kontekstual, yaitu materi pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan lingkungan kehidupan peserta didik. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik akan lebih mudah memahami materi karena berkaitan langsung dengan realitas kehidupan sehari-hari. Prinsip kedua adalah perkembangan kognitif dan moral peserta didik. Materi pembelajaran etika politik harus diberikan sesuai tingkat usia dan kemampuan berpikir peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Selain itu, prinsip integrasi lintas mata pelajaran juga menjadi bagian penting dalam implementasi kurikulum etika politik. Nilai-nilai etika politik tidak hanya diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), tetapi juga dapat diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran lain seperti sejarah, bahasa Indonesia, dan pendidikan agama. Dengan adanya integrasi tersebut, pembentukan karakter peserta didik dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan integrasi horizontal dan vertikal dalam kurikulum memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan penerapan pada satu mata pelajaran saja. Integrasi horizontal dilakukan dengan memasukkan nilai etika politik ke berbagai mata pelajaran pada tingkat pendidikan yang sama, sedangkan integrasi vertikal dilakukan secara bertahap dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Pendekatan tersebut membantu peserta didik memahami nilai etika politik secara berkesinambungan sesuai perkembangan usia dan kemampuan berpikir mereka.

Dalam proses pembelajaran, metode pedagogis menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan etika politik. Berdasarkan hasil penelitian, metode pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta



didik terhadap berbagai persoalan sosial dan politik. Peserta didik diajak untuk mengkaji kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran etika publik. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga belajar mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial.

Metode pembelajaran berbasis masalah memberikan dampak positif terhadap kemampuan analisis peserta didik. Siswa menjadi lebih aktif dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan memberikan argumentasi secara logis terhadap suatu permasalahan. Selain itu, peserta didik juga belajar memahami pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembelajaran kolaboratif dan partisipatif juga menjadi salah satu metode yang efektif dalam penerapan etika politik di sekolah. Metode ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Kegiatan seperti diskusi kelompok, debat, simulasi, role-play, dan project based learning membantu peserta didik memahami berbagai perspektif dalam kehidupan politik dan sosial. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat belajar menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah secara demokratis. Selain pembelajaran berbasis diskusi, pendekatan reflektif juga memiliki peranan penting dalam pembentukan kesadaran etika politik peserta didik. Pembelajaran reflektif dilakukan melalui penulisan jurnal refleksi, dialog sebaya, serta kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan tersebut membantu peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran tidak hanya berhenti pada aspek teori, tetapi juga diterapkan dalam perilaku nyata.

Namun demikian, implementasi etika politik dalam kurikulum sekolah masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu pembelajaran dalam struktur kurikulum yang ada saat ini. Mata pelajaran yang secara langsung membahas etika politik memiliki alokasi waktu yang terbatas sehingga guru perlu melakukan integrasi pembelajaran ke mata pelajaran lain agar nilai-nilai etika politik tetap dapat disampaikan secara optimal. Selain keterbatasan waktu, kurangnya sumber daya pengajar yang memiliki pemahaman mendalam mengenai etika politik juga menjadi hambatan dalam implementasi kurikulum. Tidak semua guru memiliki kompetensi yang memadai dalam mengajarkan nilai-nilai etika politik secara kontekstual dan aplikatif. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif.

Lingkungan sosial dan politik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran etika politik. Peserta didik seringkali melihat berbagai praktik penyimpangan



seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penyebaran informasi hoaks di media sosial. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pembelajaran di sekolah karena terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan di kelas dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan kerja sama antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah perlu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter peserta didik, sementara orang tua dan masyarakat harus memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan dan dukungan terhadap pengembangan pendidikan etika politik di sekolah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran etika politik memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan evaluasi pembelajaran pada umumnya. Penilaian tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis, tetapi juga melalui observasi perilaku, jurnal refleksi, penilaian sikap, dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sosial. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai etika politik telah dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, implementasi etika politik dalam kurikulum sekolah memiliki peranan penting dalam membentuk generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Keberhasilan implementasi tersebut sangat dipengaruhi oleh metode pembelajaran, kualitas guru, dukungan lingkungan sosial, serta kerja sama seluruh pihak dalam mendukung pendidikan karakter peserta didik.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi etika politik dalam kurikulum sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran demokrasi yang baik. Pendidikan etika politik tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai sistem politik dan kewarganegaraan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, serta sikap kritis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika politik dalam kurikulum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Nilai-nilai etika politik tidak hanya diajarkan melalui mata pelajaran tertentu, tetapi juga perlu diintegrasikan ke berbagai kegiatan pembelajaran dan kehidupan sekolah sehari-hari. Pendekatan pembelajaran berbasis diskusi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, serta refleksi terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya etika dalam kehidupan politik dan sosial. Selain itu, keberhasilan implementasi etika politik sangat dipengaruhi oleh peran guru, sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Guru memiliki peran penting sebagai fasilitator dan teladan dalam pembentukan karakter peserta



didik. Sekolah bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung penerapan nilai-nilai etika politik, sedangkan orang tua dan masyarakat berperan dalam memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, penerapan etika politik di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan waktu pembelajaran, kurangnya sumber daya pengajar yang kompeten, serta pengaruh lingkungan sosial dan media yang sering menampilkan praktik politik yang tidak sesuai dengan nilai etika. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara seluruh pemangku kepentingan agar implementasi etika politik dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Evaluasi pembelajaran etika politik juga perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui tes tertulis tetapi juga melalui observasi sikap, jurnal refleksi, partisipasi peserta didik, dan penerapan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi yang komprehensif akan membantu sekolah mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran serta menjadi bahan perbaikan dalam pengembangan kurikulum di masa mendatang.

Dengan demikian, implementasi etika politik dalam kurikulum sekolah merupakan langkah penting dalam menciptakan generasi muda yang memiliki karakter kuat, berintegritas, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan etika politik diharapkan dapat menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan bermoral di masa depan.

Daftar Pustaka

- Agung, M. (2003). *Macam-Macam Sumber Hukum Tata Negara Berdasarkan*.
- Aida, R., & Aurora, M. (2024). *Pro Kontra Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia*. 1(2), 163–170.
- April, V. N., Rahma, F. F., Karnain, B., S, H. T., & Dewi, R. (2024). *Strategi Kepemimpinan Kepala Bagian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur*
- Beadie, A., Basyar, B., & Mukhbir, M. (2025). *Evolusi Paradigma Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (1945 – 2025) : Dari Kontrol Negara Menuju Dualisme Filosofis*.
- Gatot, J., & Senayan, S. (2019). *Analisis Pengalihan Aset SMA / SMK sebagai Dampak dari Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan : Studi di Provinsi Banten Analysis of Transfer of SMA / SMK Assets as Impact of Government Affairs Transfer*. 10(2), 77–90.
- Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Community Based Tourism (Studi Pada Desa Tanjung Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto) Yuli Ardianti Deby Febriyan Eprilianto*.
- Jurnal, M. A. P., Publik, A., No, V., Sma, D. I., Gresik, N., Jurnal, M. A. P., & Publik, A. (n.d.). *PENERAPAN SISTEM KREDIT SEMESTER MERDEKA BELAJAR*. 7(2).
- Kapitalisme, S., Dan, S., & Klasik, N. (2026). *Membangun Sistem Ekonomi Hukum Yang Berkeadilan*. 2360–2370.
- Karya, J., Pendidikan, I., & Vol, T. (2026). *Implementasi Kebijakan Sistem Penerimaan Murid*



- Baru (SPMB) Sistem Zonasi dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. 4(1), 1–15.*
- Kegiatan, P., Masyarakat, B., & Di, P. (2000). *PRAKTEK KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN PADA.*
- Mahardika, A. B., Nisrina, M., Birowo, N., & Syaikhan, M. A. (2024). *Sistem Ekonomi Islam dalam Konteks Kehidupan Masyarakat Madani Berdasarkan Hukum Islam. 7693, 151–161.*
- Maulana, L., Al-farizi, M. R., Robbani, M. S., & Mentari, A. (2026). *Desentralisasi yang Berliku : Menelusuri Dinamika , Ketimpangan , dan Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia. 4(1), 364–375.*
- Novita, N. C., Sofya, A., & Annur, S. (2024). *Dinamika Pendidikan Indonesia dan Turki : Studi Komparatif The Dynamics of Indonesian and Turkish Education : A Comparative Study. 4(3), 1748–1762.*
- Orang, S., Komersial, P. S., Orang, S., Cipta, H., Komersial, P. S., Orang, S., Cipta, H., Komersial, P. S., & Orang, S. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ketentuan Pidana.*
- Pemerintahan, I., Mendukung, D., & Development, S. (n.d.). *Inovasi Pemerintahan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals ...*
- Pendidikan, E., & Pasca, I. (2018). *Eksistensi pendidikan islam pasca reformasi.*
- Pengantar, K. (2013). *Terorisme dan kekerasan berlatar belakang agama di jawa barat. November, 0–125.*
- Pengembangan, A., Madrasah, M., Luneto, H. B., & Pd, M. (n.d.). *Minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan islam (.*